



**RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

2016-2021

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan suatu organisasi tanpa terkecuali organisasi pada instansi pemerintahan. Perencanaan yang akurat dan tepat sasaran diharapkan dapat membawa organisasi tersebut menuju hasil yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut hal tersebut, maka setiap perangkat daerah (PD) pada lingkungan pemerintah daerah wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) PD untuk kurun waktu selama 5 (lima) Tahun. Renstra ini menjadi alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 (lima) Tahun ke depan.

Renstra PD merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan. Renstra PD memiliki arti dan peranan strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan pembangunan jangka panjang pemerintah daerah baik secara langsung atau tidak langsung. Renstra PD, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bersifat indikatif, serta memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi dibawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw, ***"Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, serta berkepribadian dalam budaya"***, dan dijabarkan dalam salah satu misinya, ***"Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik"***, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bersentuhan langsung dengan tata kelola pemerintahan terutama dalam manajemen kepegawaian dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat menyelaraskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan kebijakan dan peraturan Pemerintah terkait.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI). Adapun TUPOKSI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Untuk mendukung tugas Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara dan mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, maka perlu untuk menyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021, sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021, mengelaborasi pola dan prinsip pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta capaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Renstra ini disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kelemahan dan tantangan untuk kemudian dianalisis agar dapat menjadi pedoman dan dasar serta arah kebijakan yang akan memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan dan Satyalencana Karya Satya;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

- p. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah ;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
- s. Keputusan Kepala BKN Nomor 13/Kep/2002 tanggal 12 Februari 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Badan Kepegawaian Daerah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara.
- v. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025
- w. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 800/BKD/SK/467/2016 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Rencana Strategis BKD Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021 dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara 2016 -2021.
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016 – 2021 guna pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan dasar dan tolok ukur penilaian kinerja dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang akan dilaksanakan oleh BKD Provinsi Sulawesi Utara untuk kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2016 – 2021 dan pembuatan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan.
2. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat dijadikan pedoman kerja oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan optimalisasi kinerja.
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada BKD Provinsi Sulawesi Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD SULAWESI UTARA

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

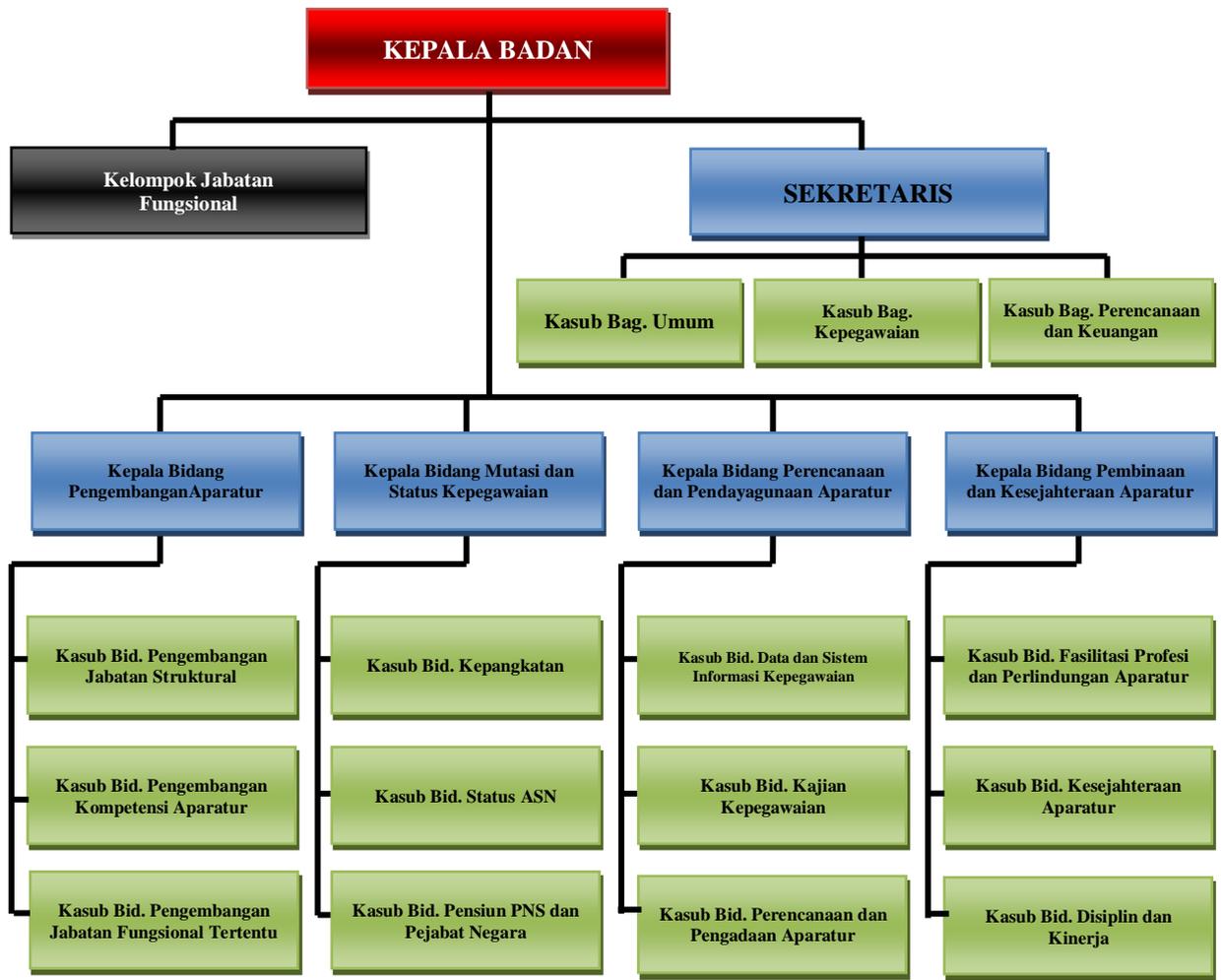
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Sementara untuk Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, pengadaan, pengembangan, mutasi, pensiun, jaringan informasi, kesejahteraan, pembinaan dan pengawasan pegawai;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka susunan organisasi BKD Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi

Utara terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala BKD
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Kepegawaian dan kelengkapan Badan Kepegawaian

Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Aparatur membawahi;
 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 3. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu.

- d. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Status ASN;
 - 3. Sub Bidang Pensiun PNS dan Pejabat Negara.
- e. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Kajian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur
- f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur membawahi;
 - 1. Sub Bidang Fasilitas Profesi dan Perlindungan Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur;
 - 3. Sub Bidang Disiplin dan Kinerja.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berikut sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Utara terhitung Akhir Bulan Mei 2016 berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang, terdiri dari 65 (enam puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 (tiga) orang sebagai Tenaga Harian Lepas (THL). Klasifikasi kualifikasi ke-65 PNS sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil Pada BKD Provinsi Sulawesi Utara, terhitung Oktober 2018)

No.	PENDIDIKAN/ JURUSAN	GOL. IV		GOL. III		GOL. II		GOL. I		JUMLAH PEGAWAI		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana (S-3)											
	1. Doktor Administrasi Negara	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2. Doktor Ilmu Hukum	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
2.	Pasca Sarjana (S-2)											
	1. Magister Administrasi Publik	1	1	4	2	-	-	-	-	5	3	8
	2. Magister Sains	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	3. Magister Hukum	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	4. Magister Manajemen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	5. Magister Ekonomi Pembangunan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
3.	Sarjana (S-1) & Diploma IV											
	1. Sarjana Ilmu Pemerintahan	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3	6
	2. Sarjana Sains Terapan Pemerintahan	-	-	8	6	-	-	-	-	8	6	14
	3. Sarjana Hukum	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	4. Sarjana Ekonomi	-	-	2	8	-	-	-	-	2	8	10
	5. Sarjana Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Sarjana Ilmu Komputer	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	7. Sarjana Teknik	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	8. Sarjana Sastra	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	9. Sarjana Pendidikan Administrasi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	10. Sarjana Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	11. Sarjana Ilmu Komunikasi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
4.	Diploma III & SMA sederajat			-								
	1. SMA/SMK	-	-	-	-	6	2	-	-	6	2	8
	2. SD/SMP	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

JUMLAH	3	5	23	25	6	2	1	-	33	32	65
--------	---	---	----	----	---	---	---	---	----	----	----

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

2.2.2 Sarana Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BKD Provinsi Sulawesi Utara mendapat dukungan sarana prasarana sebagai berikut :

NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH BARANG	KONDISI
<i>Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</i>			
Jeep	2011	1	Baik
Staion Wagon	2005	1	Rusak Berat
	2014	1	Baik
	2015	2	Baik
	2016	1	Baik
Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2008	1	Rusak Berat
<i>Kendaraan Bermotor Beroda Dua</i>			
Sepeda Motor	2005	3	Rusak Berat
	2014	3	2 Baik, 1 Rusak Berat
	2016	2	Baik
<i>Universal Tester</i>			
Scanner	2012	1	Baik
	2013	8	Baik
	2015	1	Baik
<i>Alat Ukur/Pembanding</i>			
Air Conditioning Unit	2012	2	Baik
<i>Mesin Ketik</i>			
Mesin Ketik Lain-lain	2014	5	Baik
<i>Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</i>			
Lemari Besi	2011	1	Baik
	2012	3	Baik
	2014	13	Baik
Rak Besi/Metal	2013	1	Baik
Band Kas	2014	1	Baik
Lemari Kaca	2011	3	Baik
Lemari Makan	2015	1	Baik
Lemari kayu	2014	2	Baik
<i>Alat Kantor Lainnya</i>			
Papan Visuil	2015	1	Baik
Papan Absen	2015	1	Baik
Mesin Absensi	2011	1	Baik
	2014	8	Baik
Display	2016	20	Baik
<i>Meubilair</i>			
Lemari Kayu	2009	1	Rusak Berat
	2010	2	Baik
	2013	3	Baik
	2015	1	Baik
Kursi Besi/Metal	2006	2	Rusak Berat
	2016	1	Baik
	2016	27	Baik
Meja Rapat	2013	1	Baik
	2014	21	19 Baik, 2 Rusak Berat

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

	2016	1	Baik
Meja Reseption	2016	1	Baik
Kursi Rapat	2014	10	8 Baik, 2 Rusak Berat
Kursi Lipat	2014	50	Baik
Sofa	2011	1	Baik
	2013	4	Baik
	2014	2	Baik
	2016	2	Baik
MOUBILER LAINNYA	2011	1	Baik
<i>Alat Pendingin</i>			
Lemari Es	2009	1	Rusak Berat
AC Unit	2010	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
	2011	3	2 Baik, 1 Rusak Berat
	2013	3	Baik
	2014	5	Baik
	2015	2	Baik
	2016	1	Baik
AC Split	2013	1	Rusak Berat
	2015	2	Baik
Exhause Fan	2014	2	Baik
	2016	3	Baik
	2016	1	Baik
<i>Alat Dapur</i>			
Alat Dapur Lainnya	2014	12	Baik
<i>Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</i>			
Alat Pemanas	2014	4	Baik
Televisi	2012	6	Baik
	2013	4	Baik
	2014	3	Baik
	2010	1	Baik
Sound System	2014	1	Baik
Wireless	2013	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
	2016	6	Baik
Unit Power Supply	2010	3	Rusak Berat
	2011	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
	2012	5	Baik
	2013	13	11 Baik, 2 Rusak Berat
	2015	6	Baik
	2016	32	Baik
Camera Film	2011	1	Rusak Berat
Alat Hiasan	2014	77	Baik
	2015	4	Baik
Tangga Alumunium	2015	1	Baik
Handy Cam	2015	1	Baik
Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	2	Baik
	2010	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
Kain Gorden	2014	2	Baik
	2016	1	Baik
Vertical Blind	2015	1	Baik
<i>Server Komputer</i>			
Mainframe	2009	1	Baik

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

	2013	2	Baik
Mini Komputer	2015	1	Baik
Personal Komputer Lain-lain	2011	2	Baik
<i>Personal Komputer</i>			
P.C Unit	2009	3	Rusak Berat
	2010	6	Rusak Berat
	2011	6	4 Baik, 2 Rusak Berat
	2012	9	Baik
	2013	11	Baik
	2014	8	Baik
	2015	2	Baik
	2016	29	Baik
Lap Top	2012	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
	2015	5	Baik
	2016	5	Baik
Note Book	2009	2	Rusak Berat
	2010	3	2 Baik, 1 Rusak Berat
	2011	3	Rusak Berat
	2012	1	Baik
	2013	6	Baik
	2014	12	Baik
	2015	2	Baik
	2016	3	Baik
Personal Komputer Lain-lain	2012	1	Baik
	2013	1	Baik
	2014	1	Baik
<i>Peralatan Komputer Mainframe</i>			
Hard Disk	2013	5	4 Baik, 1 Rusak Berat
	2014	3	Baik
	2015	6	Baik
	2016	2	Baik
Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2013	14	Baik
	2015	1	Baik
<i>Peralatan Mini Komputer</i>			
Printer	2009	2	Rusak Berat
	2014	4	Baik
	2015	4	Baik
<i>Peralatan Personal Komputer</i>			
Monitor	2013	9	8 Baik, 1 Rusak Berat
Printer	2010	6	3 Baik, 3 Rusak Berat
	2012	5	Baik
	2016	4	Baik
External	2012	1	Baik
Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2013	3	Baik
<i>Peralatan Jaringan</i>			
Server	2016	1	Baik
Router	2012	5	Baik
Hub	2012	1	Baik
Modem	2012	1	Baik
	2013	1	Baik
Netware Interface External	2012	2	Baik

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Peralatan Jaringan Lain-lain	2012	8	5 Baik, 3 Rusak Berat
	2014	3	Baik
	2016	32	Baik
<i>Meja Kerja Pejabat</i>			
Meja Kerja Pejabat Eselon II	2011	1	Baik
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2014	10	Baik
	2016	28	Baik
<i>Kursi Kerja Pejabat</i>			
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2011	1	Rusak Berat
	2014	1	Baik
	2015	1	Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2012	5	Rusak Berat
	2014	1	Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2012	13	Rusak Berat
	2016	20	Baik
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	60	Baik
	2013	8	Baik
<i>Lemari dan Arsip Pejabat</i>			
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2012	1	Baik
<i>Peralatan Studio Visual</i>			
Camera + Attachment	2010	1	Rusak Berat
	2013	1	Baik
Unintemuptible Power Supply (UPS)	2011	4	2 Baik, 2 Rusak Berat
<i>Peralatan Studio Video dan Film</i>			
Slide Projector	2011	1	Rusak Berat
	2013	1	Baik
	2015	1	Baik
Camera Film	2014	3	Baik
<i>Alat Komunikasi Telephone</i>			
Pesawat Telephone	2013	6	Baik
Facsimile	2013	1	Baik
<i>Bidang Studi : IPA Lanjutan</i>			
Layar	2015	1	Baik
<i>Bidang Studi : Kesenian</i>			
Recorder	2015	2	Baik
<i>Recorder Display</i>			
Printer	2011	14	5 Baik, 9 Rusak Berat
<i>Alat Keamanan</i>			
Alat Keamanan Lain-lain	2013	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 72 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2016-2021, maka sasaran prioritas pembangunan bidang kepegawaian adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang professional, berdaya saing dan memiliki integritas. Untuk melaksanakan sasaran prioritas tersebut, maka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah, ada beberapa kebijakan dalam urusan kepegawaian, yaitu kebijakan peningkatan pelayanan publik yang berbasis *Good Governance* dan *Clean Government*, kebijakan memperkuat akuntabilitas dan audit kinerja pemerintah daerah guna terselenggaranya sistem reward and punishment yang mendorong akselerasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selama periode 2010-2015, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang pencapaian visi misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Capaian kinerja berdasarkan realisasi capaian selama kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.3 dimana berdasarkan analisis capaian kinerja, pencapaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara berada dalam kategori berhasil.

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Table 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya SDM Aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;		3 kali	1 kali	2 kali	5 kali		3 kali	1 kali	2 kali	4 kali		100%	100%	100%	80%
2	Peningkatan pengetahuan PNS di lingkungan BKD Prov. Sulut;		1 kali	3 kali	6 kali	6 kali		1 kali	3 kali	6 kali	6 kali		100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya kegiatan seleksi Capra IPDN;	76 orang	50 orang	50 orang	60 orang	68 orang	76 orang	75 Orang	75 orang	35 orang	14 orang	100%	150%	150%	58%	20%
4	Kajian-kajian peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;		3 kajian	3 kajian	6 kajian	5 kajian		3 kajian	6 kajian	6 kajian	10 kajian		100%	200%	100%	200%
5	Tersedianya PNS yang berdaya saing tinggi					1 kali					1 kali					100%
6	Terselenggaranya kegiatan seleksi penerimaan Calon PNS;	287 orang		1 kali	1 kali		287 orang		1 kali	1 kali		100%		100%	100%	
7	Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan diklat;		1 kali		6 kali	1 kali		1 kali		9 kali	9 kali		100%		150%	900%
8	Pengelolaan dan pelayanan kepegawaian dilaksanakan oleh PNS yang terlatih;		0		2 kali	2 kali		0		2 kali	2 kali				100%	100%

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

9	Terlaksananya pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan;	530 Orang	500 orang	500	2 kali	2 kali	530 orang	675 orang	675	2 kali	2 kali	100%	125%	135%	100%	100%
10	Terlaksananya kegiatan sumpah/janji PNS;	683 orang	200 orang		1 kali	1 kali	683 orang	178 orang		1 kali	1 kali	100%	98%		100%	100%
11	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 paket				4 orang	1 paket				4 orang	100%				100%
12	Terlaksananya seleksi dan rekrutmen PNS yang mengikuti diklat struktural, fungsional dan teknis	120 orang					120 orang					100%				
13	Jumlah PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan formal S2, S3, diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional		250 orang					375 orang					150%			
14	Kenaikan Pangkat PNS	2697 orang	2000 orang	2000 orang	1500 orang	100%	2697 orang	3203 orang	2471 orang	2221 orang	100%	100%	160%	120%	148%	100%
15	SK pensiun PNS	840 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%	840 orang	317 orang	494 orang	415 orang	100%	100%	105%	164%	138%	100%
16	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 paket			100%	100%	1 paket			100%	100%	100%			100%	100%
17	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 paket			100%	100%	1 paket			100%	100%	100%			100%	100%
18	Terlaksananya proses administrasi Askes, Taspen, dan Bapertarum	31 orang	200 orang	200 orang	100%	100%	31 orang	232 orang	232 orang	100%	100%	100%	116%	116%	100%	100%
19	SK Tugas belajar dan ijin belajar	42 orang	40 orang		20 SK	20 konsep SK	42 orang	76 orang		48 SK	92 konsep SK	100%	190%		240%	460%

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

20	Pengalihan status CPNS menjadi PNS		100 CPNS					118 CPNS					118%			
21	Terlaksananya penyusunan RKA/DPA pada BKD Sulut	1 set					1 set					100%				
22	Terlaksananya penyediaan jasa Administrasi keuangan pada BKD Prov. Sulut.	1 paket					1 paket					100%				
23	Penyediaan aplikasi pengadaan, kenpa, pensiun dan aplikasi PNS		100%					100%					100%			
24	Pembuatan DP-3 bagi pejabat Es. I,II,III,IV	251 orang					251 orang					100%				
25	Pengusulan Karpeg	149 orang					149 orang					100%				
26	Instruksi dan SK pemindahan pegawai	368 orang	150 orang	250 orang	400 orang	100%	368 orang	150 orang	800 orang	608 orang	100%	100%	100%	320%	152%	100%
27	Tersusunnya formasi jabatan struktural	412 orang	50%	400 jabatan	80 jabatan	12 bulan	412 orang	40%	541 jabatan	343 jabatan	12 bulan	100%	80%	135%	428%	100%
28	Tersusunnya formasi jabatan fungsional	412 orang	6 jenis		80 orang	100%	412 orang	6 jenis		326 orang	100%	100%	100%		407%	100%
29	Tersedianya data-data formasi PNS		1 buku	1 buku	1 dokumen	1 dokumen		1 buku	1 buku	1 dokumen	1 dokumen		100%	100%	100%	100%
30	Terlaksananya ujian dinas penyesuaian ijazah	79 orang			1 kali	1 kali	79 orang			1 kali	1 kali	100%			100%	100%
31	Terlaksananya penilaian calon pejabat struktural eselon II kab/kota dan calon sekretaris daerah kab/kota		100%	75 jabatan	6 kali	6 kali		100%	150 jabatan	17 kali	8 kali		100%	200%	283%	133%

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

32	Jumlah tambahan formasi CPNS		287 orang					0								
33	Terlaksananya kegiatan pemetaan potensi pegawai				1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100%	100%
34	Terlaksananya penyusunan pembinaan karier PNS	1 paket					1 paket					100%				
35	Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	1 paket	100%	100%	1 aplikasi	100%	1 paket	100%	100%	1 aplikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Pengelolaan yang baik dan pembenahan arsip manual kepegawaian		6000 PNS	5262 PNS	100%	100%		6000 PNS	5262 PNS	100%	100%		100%	100%	100%	100%
37	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtiras realisasi kinerja BKD Prov. Sulut per bulan		12 buku	2 laporan	2 laporan	4 laporan		12 buku	2 laporan	2 laporan	4 laporan		100%	100%	100%	100%
38	Tersedianya laporan realisasi anggaran, prognosis I dan II BKD Prov. Sulut		2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan		100%	100%	100%	100%
39	Tersedianya CALK, LAKIP dan Laporan Kegiatan Tahunan BKD Prov. Sulut	1 buku	3 buku	3 buku	3 laporan	3 laporan	1 buku	3 buku	3 buku	3 laporan	3 laporan	100%	100%	100%	100%	100%
40	Tersedianya laporan bulanan BKD Prov. Sulut		12 laporan	24 laporan	12 laporan	10 laporan		12 laporan	24 laporan	12 laporan	10 laporan		100%	100%	100%	100%
41	Terlaksananya pengembangan sistem jaringan informasi kinerja pegawai	1 paket			1 aplikasi	100%	1 paket			1 aplikasi	100%	100%			100%	100%

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

42	Tersedianya materi-materi untuk diseminasi				1 kali	100%				1 kali	100%				100%	100%
43	Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi data kepegawaian				2 laporan	4 laporan				2 laporan	4 laporan				100%	100%
44	Tersedianya mesin absensi sidik jari untuk kebutuhan informasi kinerja pegawai				8 unit					8 unit					100%	
45	Terlaksananya penyusunan program kerja BKD 2010	1 buku						1 buku				100%				
46	Terlaksananya penyusunan PPAS/PPA	1 paket						1 paket				100%				
47	Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar aturan	6 orang	100%	20 kasus	100%	100%	6 orang	100%	25 kasus	100%	100%	100%	100%	125%	100%	100%
48	Pelaporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan;		1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan		100%	100%	100%	100%
49	Tersedianya informasi proses tugas belajar PNS dan Praja IPDN					100%					100%					100%
50	Terlaksananya pembinaan disiplin PNS di kab/kota Seprovinsi Sulawesi utara				15 Kab / Kota	2 kali				15 Kab / Kota	2 kali				100%	100%
51	Terlaksananya penilaian disiplin per PD	42 PD		52 PD	52 PD	2 kali	42 PD		52 PD	52 PD	2 kali	100%		100%	100%	100%
52	PNS yang dapat memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian		1 kali	1 kali	6 kali	4 kali		1 kali	1 kali	6 kali	4 kali		100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

53	Terlaksananya kegiatan pengawasan manajemen kinerja			100%	100%	12 kali			100%	100%	12 kali				100%	100%
54	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan karakter dan mental PNS		1 kali	1 kali	1 kali	600 PNS		1 kali	1 kali	1 kali	600 PNS		100%	100%	100%	100%
55	Pembinaan disiplin pegawai	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan			11 kegiatan	11 kegiatan	12 kegiatan			90%	91%	100%		
56	Rata-rata jumlah kehadiran pejabat struktural		1072PNS					1072 PNS					100%			
57	Terlaksananya rapat konsolidasi di bidang kepegawaian		1 kali	1 kali	1 kali	2 kali		1 kali	1 kali	1 kali	2 kali		100%	100%	100%	100%
58	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan pakaian olahraga	60 orang	52 pasang	68 pasang	64 orang	64 orang	60 orang	52 pasang	68 pasang	64 orang	64 orang	100%	100%	100%	100%	100%
59	Terlaksananya kegiatan seleksi pegawai berprestasi	1 kali	36 orang	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	37 orang	1 kali	1 kali	1 kali	100%	102%	100%	100%	100%
60	Pakaian Khusus hari-hari tertentu				64 set	70 orang				64 set	70 orang				100%	100%
61	Terlaksananya pengelolaan pengembalian tabungan Taperum	261 orang					261 orang					100%				
62	Pelaksanaan monitoring praja IPDN		12 orang					12 orang					100%			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dalam pengembangan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara muncul sejumlah tantangan seperti tersebut di bawah ini :

- a. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat
- b. Pengisian jabatan berdasarkan Undang-undang No. 5/2014 tentang ASN
- c. Pengelolaan manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme sumber daya aparatur
- d. Pola rekrutmen yang benar sesuai dengan peraturan yang berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi
- e. Masih adanya Pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS
- f. Pengaplikasian sistem ISO untuk seluruh pelayanan administrasi kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yakni :

- Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil
- Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS
- Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat
- Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat

B A B III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, maka alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisis baik lingkungan internal maupun eksternal.

3.1.1. Analisis lingkungan internal dan eksternal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan **kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength)** organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai **peluang (opportunity) dan tantangan (threats)** organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Dengan menggunakan pendekatan USG (Urgency, Seriousness, Growth) maka diperoleh beberapa hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

A. FAKTOR INTERNAL :

1. KEKUATAN :

- Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian
- Adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian

- Adanya struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam pelaksanaan tugas
- Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dan komitmen kinerja yang baik
- Teknologi informasi yang terus berkembang

2. KELEMAHAN :

- Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran
- Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS
- Masih belum sesuai pengisian formasi atau pendistribusian pegawai pada masing-masing Bidang Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan spesifikasi disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya
- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui sistem renumerasi yang adil, layak dan kompetitif
- Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan manajemen kepegawaian

B. FAKTOR EKSTERNAL :

1. PELUANG

- Adanya potensi sumber daya aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil
- Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan sumber daya aparatur (pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan yang berbasis keahlian atau keterampilan)
- Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional
- Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
- Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat

2. TANTANGAN

- Diberlakukannya Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga banyak perubahan, dan penyesuaiaan terkait dengan perubahan mendasar sistem menajamen aparatur sipil negara, di mana perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan
- Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai
- Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti
- Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Identifikasi tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan alat analisa yakni SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats). Analisis SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (Strenght) dan peluang (Opportunity) yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara kemudian dibandingkan dengan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats) yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan hasil akhir yakni strategi yang akan dipakai oleh organisasi dalam mengatasi masalah yang ada. Berikut ini dijelaskan pembobotan dan komparasi sampai dengan memperoleh strategi dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut.

**IDENTIFIKASI FAKTOR
INTERNAL DAN EKSTERNAL**

FAKTOR INTERNAL	
<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian 2. Adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian 3. Adanya struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam pelaksanaan tugas 4. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dan komitmen kinerja yang baik 5. Teknologi informasi yang terus berkembang 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 2. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran 3. Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS 4. Masih belum sesuai pengisian formasi atau pendistribusian pegawai pada masing-masing Bidang Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan spesifikasi disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya 5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui sistem renumerasi yang adil, layak dan kompetitif 6. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan manajemen kepegawaian
FAKTOR EKSTERNAL	
<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi sumber daya aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil 2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan sumber daya aparatur (pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan yang berbasis keahlian atau keterampilan) 3. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional 4. Peningkatan kesejahteraan pegawai 5. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat 	<p style="text-align: center;">TANTANGAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberlakukannya Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga banyak perubahan, dan penyesuaian terkait dengan perubahan mendasar sistem manajemen aparatur sipil negara, di mana perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan 2. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai 3. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti 4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

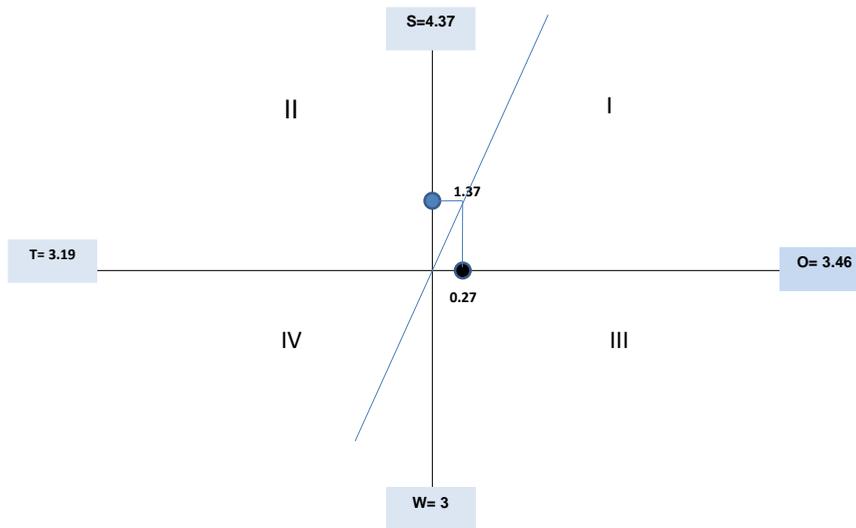
KOMPARASI URGENSI FAKTOR INTERNAL

NO	Faktor Internal	Faktor Yang Lebih Urgent											NF	BF (%)	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k			
	Kekuatan (S)														
a	Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	10	0.18
b	Adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian	a		b	b	b	f	b	b	b	b	b	8	0.15	
c	Adanya struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam pelaksanaan tugas	a	b		d	c	f	c	c	i	c	k	4	0.07	
d	Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dan komitmen kinerja yang baik	a	b	d		e	d	g	h	d	j	k	3	0.06	
e	Teknologi informasi yang terus berkembang	a	b	c	e		f	e	e	i	e	k	4	0.07	
	Kelemahan (W)														
f	Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	a	f	f	d	f		f	h	f	j	f	6	0.11	
g	Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran	a	b	c	g	e	f		h	g	g	g	4	0.07	
h	Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS	a	b	c	h	e	h	h		h	j	k	4	0.07	
i	Masih belum sesuai pengisian formasi atau pendistribusian pegawai pada masing-masing Bidang Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan spesifikasi disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya	a	b	i	d	i	f	g	h		i	i	4	0.07	
j	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui sistem renumerasi yang adil, layak dan kompetitif	a	b	c	j	e	j	g	j	i		j	4	0.07	
k	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan manajemen kepegawaian	a	b	k	k	k	f	g	k	i	j		4	0.07	
		10	8	4	3	4	6	4	4	4	4	4	55		

KOMPARASI URGENSI FAKTOR EKSTERNAL

NO	Faktor Internal	Faktor Yang Lebih Urgent										NF	BF (%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i			
	Peluang (O)												
a	Adanya potensi sumber daya aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil		a	a	a	a	f	a	a	a		7	0.19
b	Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan sumber daya aparatur (pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan yang berbasis keahlian atau keterampilan)	a		b	b	e	f	g	b	b		4	0.11
c	Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional	a	b		c	c	f	g	c	c		4	0.11
d	Peningkatan kesejahteraan pegawai	a	b	c		d	f	d	h	d		3	0.08
e	Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat	a	e	c	d		f	g	e	i		2	0.06
	Tantangan (T)												
f	Diberlakukannya Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga banyak perubahan, dan penyesuaian terkait dengan perubahan mendasar sistem menajemen aparatur sipil negara, di mana perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan	f	f	f	f	f		f	f	f		8	0.22
g	Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai	a	g	g	d	g	f		g	g		5	0.14
h	Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti	a	b	c	h	e	f	g		h		2	0.06
i	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	a	b	c	d	i	f	g	h			1	0.03
		7	4	4	3	2	8	5	2	1		36	

PETA POSISI KEKUATAN ORGANISASI



FORMULASI STRATEGI SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian Adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran
	<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya potensi sumber daya aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan sumber daya aparatur (pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan yang berbasis keahlian atau keterampilan) 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan peraturan perundang-undangan kepegawaian dalam pengembangan potensi ASN Peningkatan koordinasi dengan berbagai sektor dan tingkatan dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas
<p>TANTANGAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Diberlakukannya Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga banyak perubahan, dan penyesuaiaan terkait dengan perubahan mendasar sistem manajemen aparatur sipil negara, di mana perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai 	<p>STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara Mengoptimalkan dukungan pimpinan dalam rangka perbaikan kinerja dan profesionalisme ASN 	<p>STRATEGI WT</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam rangka peningkatan profesionalisme ASN Peningkatan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi

**TAPISAN STRATEGI
(KWADRAN I)**

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	KEMUDAHAN	BIAYA	TOTAL
1	Penerapan peraturan perundang-undangan kepegawaian dalam pengembangan potensi ASN	5	5	4	14
2	Peningkatan koordinasi dengan berbagai sektor dan tingkatan dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas	4	4	4	12

**TAPISAN STRATEGI
(KWADRAN II)**

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	KEMUDAHAN	BIAYA	TOTAL
1	Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur lewat pemetaan kompetensi	4	4	4	12
2	Peningkatan komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak dalam pendayagunaan aparatur	4	4	5	14

**TAPISAN STRATEGI
(KWADRAN III)**

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	KEMUDAHAN	BIAYA	TOTAL
1	Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara	5	4	4	13
2	Mengoptimalkan dukungan pimpinan dalam rangka perbaikan kinerja dan profesionalisme ASN	4	4	3	11

TAPISAN STRATEGI
(KWADRAN IV)

NO	STRATEGI	EFEKTIVITAS	KEMUDAHAN	BIAYA	TOTAL
1	Penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam rangka peningkatan profesionalisme ASN	5	4	4	13
2	Peningkatan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi	4	4	3	11

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Dalam Tahun periode 2016 - 2021, Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara adalah "TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, SERTA BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA", sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara lebih sejahtera.

Visi Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMD 2016-2021 sebenarnya mengacu pada Trisakti yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

3. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Misi dari Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat pada Misi ke-7 yakni : **“Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik”**. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bersentuhan langsung dengan tata kelola pemerintahan terutama dalam manajemen kepegawaian dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting untuk meningkatkan profesionalisme ASN dan pelayanan publik yang berkualitas.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara

Komitmen Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membangun sistem manajemen PNS dituangkan dalam Visi BKN sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis 2015-2019, yaitu: **“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang profesional dan bermartabat Tahun 2025.**

Terdapat dua kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang Visi BKN yaitu profesional dan bermartabat.

- **Profesional.**

- a) BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara selektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

- b) BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.
- **Bermartabat**
 - a) BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digarisi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN.
 - c) Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme.

Rencana strategis yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara adalah mengembangkan seluruh komponen sistem manajemen kepegawaian guna mendukung terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, netral, memiliki kompetensi dan berintegritas.

Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah “Menjadi penyelenggara manajemen kepegawaian yang professional dan berintegritas dalam rangka mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik serta berkepribadian dalam budaya.” Beberapa unsur yang terkandung dalam visi tersebut selaras dengan visi BKN yaitu mewujudkan sumber daya aparatur yang professional dan berintegritas.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Visi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) adalah “Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan

public yang berkinerja tinggi.” Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian PANRB mempunyai misi :

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian PANRB, nilai dasar yang harus dijunjung tinggi adalah integritas, profesional dan akuntabel.

Adapun aparatur negara yang berkepribadian, bersih dan kompeten bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, istitusional maupun sistem yang profesional mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi. Berdasarkan Visi dari Kementerian PANRB, dapat dikatakan bahwa Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa.” Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri: Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik: Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
3. Menegakkan Demokrasi: Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri.

Berkaitan dengan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka yang menjadi langkah strategi adalah regulasi yang mendukung pengembangan Aparatur Sipil Negara, sehingga terdapat keselarasan ketika pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya, kemudian daerah menindaklanjuti dengan regulasi yang disesuaikan dengan tuntutan pelayanan publik yang profesional dan memiliki integritas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021

Dalam upaya mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021 maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk dicapai dalam lima tahun kedepan (2016-2021) sebagai berikut:

"Terwujudnya Sulawesi Utara Yang Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik Serta Berkepribadian Dalam Budaya Melalui Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Yang Profesional Dan Berintegritas".

Visi tersebut diatas mempunyai makna :

1. **Profesional** : BKD sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah dengan mengoptimalkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang bekerja sesuai dengan kemampuan dan jabatan yang diembannya, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkeadilan.
2. **Integritas** : BKD melaksanakan Manajemen Kepegawaian Daerah yang menghasilkan lembaga pelayanan dengan tata kerja yang transparan, akuntabel oleh pelaku birokrasi yang memiliki dedikasi untuk melayani kepentingan publik sebagaimana yang menjadi kebutuhan organisasi dan harapan publik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata yang dijabarkan dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diadopsi dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yaitu penjabaran Misi-7 "Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik."

Adapun langkah strategis yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan misi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara.
2. Mengoptimalkan pelayanan kepegawaian daerah.
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
4. Mengoptimalkan pengawasan Aparatur Sipil Negara.
5. Mengoptimalkan pembinaan sistem manajemen kepegawaian dan sumber daya Aparatur Sipil Negara
6. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
7. Mengoptimalkan manajemen internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menuju wilayah taat administrasi dan wilayah bebas korupsi;
3. Meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatkan integritas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Sedangkan sasaran untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021, yaitu :

1. Peningkatan integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Terwujudnya konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Terselenggaranya pelayanan publik yang berdaya saing.

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Adapun keterkaitan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021 digambarkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan DPRD dan stakeholder terkait
			Tersosialisasinya kegiatan dprd secara berkala, update dan transparan
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menuju wilayah taat administrasi dan wilayah bebas korupsi	Terwujudnya peningkatan kualitas reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit	Menempatkan asn berdasarkan kompetensi dan prestasi sekaligus pemberian penghargaan, apresiasi dan tunjangan berbasis kinerja
			Mendorong inovasi dan kreativitas ASN dalam pelaksanaan pembangunan
Meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pemb. daerah	Peningkatan dan pengembangan konsistensi perencanaan dan penganggaran	Mendorong terintegrasinya sistim perencanaan dalam bentuk elektronik planning, budgeting, auditing yang diinformasikan secara transparan kepada publik
			Memantapkan kualitas perencana di tingkat PD
		Peningkatan monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja	Memantapkan koordinasi pengawasan akuntabilitas kinerja PD dan APIP
Meningkatkan integritas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Terselenggaranya pelayanan publik yang berdaya saing	Memantapkan kualitas pelayanan publik di bidang perijinan	Memantapkan kualitas pelayanan publik asn yang transparan dan akuntabel
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan.	Peningkatan cakupan Registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan diatas, maka BKD Provinsi Sulawesi Utara menuangkan Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sebagaimana terlampir pada tabel 5.1.

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD BKD; Nilai LKIP BKD rata-rata Minimum B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD BKD; Nilai LKIP BKD rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	1,213,155,500	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	888,048,980	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	948,363,980	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	948,363,980	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	948,363,980	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	BKD
1	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum		12 Bulan	428,902,500	12 Bulan	388,740,720	12 Bulan	388,863,980	12 Bulan	388,863,980	12 Bulan	388,863,980		
2	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi keuangan		12 Bulan	223,000,000	12 Bulan	192,070,000	12 Bulan	194,000,000	12 Bulan	194,000,000	12 Bulan	194,000,000		
3	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa		12 Bulan	86,065,100	12 Bulan	85,000,000	12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	110,000,000		
4	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian		12 Bulan	42,636,000	12 Bulan	34,000,000	12 Bulan	36,000,000	12 Bulan	36,000,000	12 Bulan	36,000,000		
5	Kegiatan Penataan Kearsipan	Ketersediaan kebutuhan untuk kegiatan penataan kearsipan		12 Bulan	22,458,000	12 Bulan	8,600,000	12 Bulan	9,500,000	12 Bulan	9,500,000	12 Bulan	9,500,000		
6	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi		32 Kegiatan	410,093,900	32 Kegiatan	179,638,260	12 Bulan	210,000,000	12 Bulan	210,000,000	12 Bulan	210,000,000		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD BKD; Nilai LKIP BKD rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	1,523,624,200	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	466,100,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	1,034,000,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	1,034,000,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	1,034,000,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	BKD

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat						1 Unit	450,000,000	1 Unit	450,000,000	1 Unit	450,000,000		
	2	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Prosentase ketersediaan peralatan kantor yang memadai		65 Unit	1,156,840,000	95 unit	205,400,000	160 unit	320,000,000	160 unit	320,000,000	160 unit	320,000,000		
	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor		1 Gedung Kantor	44,722,000	1 Gedung Kantor	23,100,000	1 Gedung Kantor	24,000,000	1 Gedung Kantor	24,000,000	1 Gedung Kantor	24,000,000		
	4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		24 Unit	278,062,200	18 unit	182,600,000	14 unit	184,000,000	14 unit	184,000,000	14 unit	184,000,000		
	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan / perlengkapan gedung kantor	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor		170 Unit	44,000,000	480 unit	55,000,000	300 unit	56,000,000	300 unit	56,000,000	300 unit	56,000,000		
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentasi peningkatan disiplin ASN	94%	94%	147,500,000	95%	60,800,000	96%	160,800,000	97%	160,800,000	97%	160,800,000	97%	BKD
	1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah unit mesin/kartu absensi						4 Unit	24,000,000	4 Unit	24,000,000	4 Unit	24,000,000		
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas		70 Orang	45,500,000	75 Orang	60,800,000	76 Orang	60,800,000	76 Orang	60,800,000	76 Orang	60,800,000		
	3	Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu	Jumlah PNS yang menerima Pakaian Khusus hari tertentu		80 Orang	69,000,000			76 Orang	76,000,000	76 Orang	76,000,000	76 Orang	76,000,000		
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD BKD; Nilai LKIP BKD rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B		625,851,800	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	179,840,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	177,000,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	177,000,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	177,000,000	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	BKD
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat													
	2	Sosialisasi peraturan perundang - undangan kepegawaian	Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota		5 Kegiatan	284,406,400	4 Kegiatan	60,960,000	3 Kegiatan	72,000,000	3 Kegiatan	72,000,000	3 Kegiatan	72,000,000		
	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah pelaksanaan Bimtek bagi PNS BKD dan PNS BKD yang mengikuti Bimtek		8 ASN	85,203,200	8 ASN	33,000,000								
	4	Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pelaksanaan pelatihan kepegawaian bagi PNS BKD		10 Kegiatan	82,925,000	10 kegiatan	65,240,000	12 Materi	84,000,000	12 Materi	84,000,000	12 Materi	84,000,000		

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

	5	Bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		1 ASN	11,741,000										
	6	Workshop kepegawaian	Jumlah pelaksanaan workshop bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota		2 Kegiatan	43,074,600	2 Kegiatan	20,640,000	1 Kegiatan	21,000,000	1 Kegiatan	21,000,000	1 Kegiatan	21,000,000		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	100%	43,450,450	100%	39,300,000	100%	39,100,000	100%	39,100,000	100%	39,100,000	100%	BKD
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan		3 Laporan	11,941,000	3 Laporan	24,030,000	3 Laporan	22,000,000	3 Laporan	22,000,000	3 Laporan	22,000,000		
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan		1 laporan	7,444,000	1 laporan	2,280,000	1 laporan	3,400,000	1 laporan	3,400,000	1 laporan	3,400,000		
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan		2 Laporan	5,884,000	3 Laporan	2,490,000	3 Laporan	3,800,000	3 Laporan	3,800,000	3 Laporan	3,800,000		
	4	Penyusunan Pelaporan Bulanan SKPD	Jumlah laporan		10 Laporan	18,181,450	10 Laporan	10,500,000	10 Laporan	9,900,000	10 Laporan	9,900,000	10 Laporan	9,900,000		
6	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan		Prosentasi penyelenggaraan memeriahkan Proklamasi Kemerdekaan RI dan HUT Prov. Sulut	100%	100%	140,240,000	100%	246,250,000	100%	228,000,000	100%	228,000,000	100%	228,000,000	100%	BKD
	1	Pelaksanaan Lomba PBB	Jumlah PNS yang mendapatkan pembinaan Baris Berbaris		600 PNS	140,240,000	600 PNS	246,250,000	600 PNS	228,000,000	600 PNS	228,000,000	600 PNS	228,000,000		
7	Program Perencanaan PD		2017: Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. (Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD)	100%	100%	62,003,150	100%	53,850,000	5 Dokumen	149,000,000	5 Dokumen	149,000,000	5 Dokumen	149,000,000	100%	BKD

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

	1	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah dokumen Revisi Rencana Strategis BKD						1 Dokumen	37,000,000	1 dokumen	37,000,000	1 dokumen	37,000,000		
	2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja BKD dan Perubahan Rencana Kerja BKD		40,928,700	2 Dokumen	32,750,000	2 Dokumen	88,000,000	2 Dokumen	88,000,000	2 Dokumen	88,000,000			
	3	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah dokumen RKA BKD dan Perubahan RKA BKD		21,074,450	2 Dokumen	21,100,000	2 Dokumen	24,000,000	2 Dokumen	24,000,000	2 Dokumen	24,000,000			
8		Program Pengembangan Aparatur	2017: Tingkat pelaksanaan penyediaan aparatur yang berkualitas, profesional, dan berkompeten	1.48 orang, 2. 988 orang, 3. 2300 orang	100%	2,326,254,164	100%	1,236,020,000	1.44 orang, 2. 1100 orang, 3. 7500 orang	9,701,000,000	1.44 orang, 2. 1100 orang, 3. 7600 orang	9,943,525,000	1.44 orang, 2. 1100 orang, 3. 7700 orang	10,192,113,125	1.44 orang, 2. 1100 orang, 3. 7700 orang	BKD
	1	Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang mendapatkan beasiswa Tugas Belajar dan Pendidikan Profesi		29 ASN	1,190,000,000	50 ASN	303,670,000	49 Orang	3,755,000,000	49 Orang	3,855,000,000	49 Orang	3,953,588,125		
	2	Seleksi Peserta Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, Fungsional, dan Pendidikan Kader	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi Peserta													
	3	Seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi													
	4	Monitoring terhadap PNS Tugas Belajar dan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan	Jumlah pelaksanaan Monitoring terhadap PNS tugas Belajar dan Praja IPDN		1 Kegiatan	36,372,000										
	5	Assesment Kompetensi Pegawai ASN	Jumlah laporan assessment		1 Kegiatan	297,950,000	2 Kegiatan	245,950,000	2 Laporan	130,000,000	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	170,000,000		
	6	Penilaian Calon Pimpinan Tinggi Pratama Kabuten/Kota	Jumlah pelaksanaan Keg penilaian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kab dan Kota		4 Kegiatan	50,500,000	4 Kegiatan	34,300,000								
	7	Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas	Terlaksananya proses mutasi JPT, Administrator dan Pengawas		4 Kegiatan	425,580,000	4 Kegiatan	471,300,000								
	8	Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu	2017-2018: Jumlah JFT yang difasilitasi		4 Kegiatan	84,000,000	4 Kegiatan	120,800,000	350 berkas	135,000,000	350 berkas	155,000,000	350 berkas	175,000,000		
	9	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi sertifikasi yang dilaksanakan		4 Kegiatan	37,000,000	6 Kegiatan	45,000,000								

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

10	Fasilitasi Peserta Diklat Kepemimpinan I dan Diklat Kepemimpinan II	Jumlah Peserta Diklat PIM I dan PIM II yang difasilitasi		1 orang	204,852,164	2 ASN	15,000,000								
11	Pemrosesan Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Prosentase berkas yang diproses dibandingkan berkas yang masukkan						1	12,000,000	1	14,525,000	1	14,525,000		
12	Koordinasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKD Prov. Sulut						6 Laporan	46,000,000	6 Laporan	46,000,000	6 Laporan	46,000,000		
13	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi						5 Tahapan	350,000,000	5 Tahapan	350,000,000	5 Tahapan	380,000,000		
14	Mutasi Jabatan Administrasi	Jumlah tahapan mutasi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas						4 Tahapan	110,000,000	4 Tahapan	110,000,000	4 Tahapan	130,000,000		
15	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Jumlah PD/ instansi pemerintah						40 PD	60,000,000	40 PD	60,000,000	40 PD	70,000,000		
16	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah dokumen sertifikasi yang akan diusulkan						6 dokumen	-	6 dokumen	-	6 dokumen	-		
17	Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pegawai ASN	Jumlah Pegawai ASN yang ditugaskan dalam Diklat Kepemimpinan						9 Orang	540,000,000	9 Orang	540,000,000	9 Orang	560,000,000		
18	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Teknis, Fungsional, dan Manajerial Pegawai ASN	Jumlah Pegawai ASN yang ditugaskan dalam Diklat, Bimtek, Workshop, Kursus, Seminar, Penataran, dan Praktek Kerja di kantor Pemerintah dan Swasta, dalam dan luar Negeri						120 orang	4,563,000,000	120 orang	4,663,000,000	120 orang	4,693,000,000		
9	Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian	Tingkat kinerja peningkatan karir, mutasi dan proses pensiun PNS	100%	100%	678,918,700	100%	484,955,000	3 kegiatan	536,000,000	3 kegiatan	549,400,000	3 kegiatan	563,135,000	3 kegiatan	BKD
1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	2017-2018: Jumlah dokumen PNS yang dapat diproses untuk kenaikan pangkat		4000 dokumen	304,525,000	4000 Dokumen	197,420,000	4000 Dokumen	210,000,000	4000 Dokumen	215,250,000	4000 Dokumen	220,631,250		
2	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah pelaksanaan ujian dinas		1 kegiatan	32,918,600	1 Kegiatan	32,000,000	90%	35,000,000	90%	35,875,000	90%	36,771,875		
3	Pemrosesan Pensiun	Jumlah kegiatan pemrosesan Pensiun		1 kegiatan	145,350,000	4 Kegiatan	120,500,000	400 Dokumen	140,000,000	400 Dokumen	143,500,000	400 Dokumen	147,087,500		
4	Pembekalan Bagi Pegawai ASN Memasuki Purna Tugas	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembekalan		1 kegiatan	16,980,000	1 Kegiatan	23,975,000	80%	26,000,000	80%	26,650,000	80%	27,316,250		

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

	5	Pemrosesan Status Pegawai ASN	Jumlah kegiatan pemrosesan status ASN		1 kegiatan	5,685,000	1 Kegiatan	16,800,000	96%	18,000,000	96%	18,450,000	96%	18,911,250		
	6	Penilaian Kompetensi PNS Pindah-Masuk Pemprov. Sulut	Jumlah pelaksanaan penilaian kompetensi PNS pindah-masuk Pemprov. Sulut		2 kegiatan	23,960,000	2 Kegiatan	24,000,000	1 Tahapan	27,000,000	1 Tahapan	27,675,000	1 Tahapan	28,366,875		
	7	Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan Pegawai ASN	Jumlah dokumen usulan Cuti dan Pindah yang dapat diproses		500 dokumen	149,500,100	600 Dokumen	70,260,000	500 Dokumen	80,000,000	500 Dokumen	82,000,000	500 Dokumen	84,050,000		
10	Program Pembinaan Aparatur		Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	0%	100.0%	458,796,300	100%	259,620,000	3.5%	290,000,000	4%	297,250,000	4%	304,681,250	4%	BKD
	1	Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai ASN	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kehadiran PNS dan kinerja PNS		12 bulan	180,798,200	12 Bulan	35,500,000	456 Rekomendasi	40,000,000		41,000,000		42,025,000		
	2	Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang diproses		5 kasus	31,762,400	8 Kasus	34,700,000	5 Kasus	40,000,000		41,000,000		42,025,000		
	3	Inspeksi Disiplin dan Kehadiran Pegawai ASN	Jumlah pelaksanaan kegiatan inspeksi		6 kegiatan	216,136,400	32 Kegiatan	176,820,000	20.00%	180,000,000		184,500,000		189,112,500		
	4	Pembinaan dan Pengembangan Karakter dan Mental ASN	Jumlah ASN yang terlatih dalam Peraturan Baris-berbaris, pemakaian pakaian dinas dan kepribadian						10 Acara	30,000,000		30,750,000		31,518,750		
	5	Pelaksanaan Apel Kerja	Jumlah pelaksanaan seminar dan atau apel kerja		12 kegiatan	30,099,300	12 Kegiatan	12,600,000								
11	Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI		Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	100%	100%	405,714,800	100%	236,240,000	100%	405,000,000	100%	415,125,000	100%	425,503,125	100%	BKD
	1	Fasilitasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekretariat DP KORPRI Sulut		1 Kegiatan	82,203,500		45,400,000				-		-		
	2	Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI	Jumlah Anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum		12 Bulan	50,218,300	12 bulan	145,800,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	153,750,000	12 Laporan	157,593,750		
	3	Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR di Lingkungan KORPRI	Jumlah kegiatan pelaksanaan Lomba Olahraga/POR di Lingkungan KORPRI		1 Kegiatan	84,527,500		-								
	4	Pelaksanaan Lomba Seni dan Budaya di Lingkungan KORPRI	Jumlah pelaksanaan lomba seni dan budaya di Lingkungan KORPRI		1 Kegiatan	30,023,500		-				-		-		

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

5	Fasilitasi Keikutsertaan Pegawai ASN Pada PORNAS KORPRI, Lomba Seni dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi untuk mengikuti kegiatan		1 Kegiatan	78,376,000	1 kegiatan	45,040,000				-		-		
6	Musyawahar KORPRI Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah pelaksanaan musyawarah provinsi Utara		1 Kegiatan	80,366,000		-				-		-		
7	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Jumlah laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DP KORPRI						12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	30,750,000	12 Laporan	31,518,750		
8	Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR serta Seni dan Budaya di Lingkungan KORPRI	Jumlah pelaksanaan lomba olahraga/POR serta Seni dan Budaya di lingkungan KORPRI						2 Lomba	25,000,000	2 Lomba	25,625,000	2 Lomba	26,265,625		
9	Pelaksanaan PORSENI, MTQ, Lomba Kesenian dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan budaya dan kegiatan Keagamaan tingkat nasional						2 Lomba	200,000,000	2 Lomba	205,000,000	2 Lomba	210,125,000		
12	Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	2,260,992,100	100%	310,130,000	100%	318,000,000	100%	325,950,000	100%	334,098,750	100%	BKD
1	Seleksi Pegawai ASN Teladan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN Teladan		1 Kegiatan	254,467,700	1 Kegiatan	246,190,000	3 Tahapan	247,000,000	3 Tahapan	253,175,000	3 Tahapan	259,504,375		
2	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah pelaksanaan kegiatan sumpah/janji PNS		1 Kegiatan	15,267,500	1 Kegiatan	14,090,000	90%	16,000,000	90%	16,400,000	90%	16,810,000		
3	Fasilitasi Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya	jumlah pelaksanaan pemberkasan untuk pemberian penghargaan satyalancana karya satya		2 Kegiatan	66,754,500	2 Kegiatan	49,850,000	60 dokumen	55,000,000	60 dokumen	56,375,000	60 dokumen	57,784,375		
4	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi BPJS, Taspen dan Bapertarum	Jumlah pelaksanaan pemrosesan administrasi PNS untuk melengkapi persyaratan pengurusan jaminan kesehatan, pensiun dan perumahan		12 Bulan	1,924,502,400										
13	Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian	Jumlah Kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan manajemen kepegawaian	15 Kab Kota	15 Kab Kota	338,798,100	15 Kab Kota	255,850,000	15 Kab Kota	278,000,000	15 Kab Kota	284,950,000	15 Kab Kota	292,073,750	15 Kab Kota	BKD

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

1	Konsolidasi Manajemen Kepegawaian se-Sulawesi Utara	Jumlah pelaksanaan konsolidasi manajemen kepegawaian se Sulawesi Utara		1 Kegiatan	63,254,700	1 Kegiatan	39,030,000	12 Laporan	72,000,000	12 Laporan	73,800,000	12 Laporan	75,645,000		
2	Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi		1 Kegiatan	32,460,000	1 Kegiatan	39,100,000	6 Materi	42,000,000	6 Materi	43,050,000	6 Materi	44,126,250		
3	Forum BKD	Jumlah Pelaksanaan Forum BKD		6 Kegiatan	85,837,600	6 Kegiatan	106,680,000	4 Berita Acara	120,000,000	4 Berita Acara	123,000,000	4 Berita Acara	126,075,000		
4	Survey Indeks Integritas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pelaksanaan Survey Indeks Integritas Pelayanan Kepegawaian		1 Kegiatan	92,471,800		-								
5	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan	Jumlah Pelaksanaan Monev		2 Laporan	64,774,000	2 Laporan	71,040,000								
6	Survey Pelayanan Kepegawaian	Jumlah laporan hasil survey						1 Laporan	44,000,000	1 Laporan	45,100,000	1 Laporan	46,227,500		
14	Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	100%	100%	609,586,300	100%	477,900,000	100%	490,000,000	100%	502,250,000	100%	514,806,250	100%	BKD
1	Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Jumlah aplikasi sistem informasi ASN Terintegrasi yang dapat dibangun		1 Aplikasi	146,540,000	1 Aplikasi	62,800,000	1 Dokumen Blueprint	88,000,000	1 Dokumen Blueprint	90,200,000	1 Dokumen Blueprint	92,455,000		
2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah aplikasi SIMPEG yang dapat dikembangkan		12 Bulan	253,907,000	12 Bulan	208,400,000								
3	Pengembangan Sistem Informasi Kinerja ASN	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kinerja ASN yang dapat dibangun dan dikembangkan		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-		
4	Pengelolaan Absensi Online	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem absensi online PNS di seluruh SKPD		12 Bulan	31,125,000	12 Bulan	30,000,000	90 PD dan UPT	30,000,000	90 PD dan UPT	30,750,000	90 PD dan UPT	31,518,750		
5	Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian	Jumlah kegiatan dokumentasi berkas data digital dan manual PNS Pemprov. Sulut tahunan		1 Kegiatan	22,207,000	1 Kegiatan	28,580,000	3 Persen	22,000,000	3 Persen	22,550,000	3 Persen	23,113,750		
6	Fasilitasi Penyediaan Kartu Pegawai Elektronik	Jumlah kegiatan pengelolaan/pemrosesan KPE		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		
7	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Jumlah laporan rekonsiliasi		4 Laporan	155,807,300	4 Laporan	148,120,000	4 Laporan	120,000,000	4 Laporan	123,000,000	4 Laporan	126,075,000		
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola						1 Sistem Aplikasi	230,000,000	1 Sistem Aplikasi	235,750,000	1 Sistem Aplikasi	241,643,750		

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

15	Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur		1. Jumlah Dokumen Kebijakan dan Perencanaan yang disusun, 2. Prosentase calon Pegawai PNS dan THL/PPPK yang lulus seleksi daerah	1. 5 Dokumen, 2. 90%	1. 5 Dokumen, 2. 91%	1,224,291,000	1. 5 Dokumen, 2. 92%		1. 5 Dokumen, 2. 93%	1,000,000,000	1. 5 Dokumen, 2. 94%	1,025,000,000	1. 5 Dokumen, 2. 95%	1,050,625,000	1. 5 Dokumen, 2. 95%	BKD
	1	Kajian Kebijakan dan Hukum Bidang Kepegawaian	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan		5 Kajian	59,440,000	5 Kajian	46,090,000	5 Kajian	46,000,000	5 Kajian	47,150,000	5 Kajian	48,328,750		
	2	Penyusunan Pola Karir Pegawai ASN	Jumlah kegiatan penyediaan informasi pola karir usia produktif ASN Pemprov. Sulut		1 Dokumen	91,400,000						-		-		
	3	Penyusunan Standar Penilaian Kinerja ASN Berbasis Jabatan dan IT	Jumlah dokumen penyusunan standar penilaian kinerja ASN berbasis jabatan dan IT		0 Dokumen	-	1 Dokumen	45,580,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	61,500,000	1 Dokumen	63,037,500		
	4	Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	Jumlah dokumen rencana		1 Dokumen	556,720,000	1 Dokumen	28,600,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	61,500,000	1 Dokumen	63,037,500		
	5	Pengembangan Materi/Soal CAT	Tersedianya Materi/Soal test yang terkini dan berkualitas		1 Kegiatan	38,850,000	1 Kegiatan	-	3 Jenis Materi	24,000,000	3 Jenis Materi	24,600,000	3 Jenis Materi	25,215,000		
	6	Pemetaan Kompetensi dan Jabatan Pegawai ASN	Jumlah kegiatan pemetaan		0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		
	7	Penyusunan Formasi Pegawai ASN	Jumlah dokumen formasi Pegawai ASN		1 Dokumen	152,250,000	1 Dokumen	49,140,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	61,500,000	1 Dokumen	63,037,500		
	8	Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN	Jumlah pelaksanaan/fasilitasi kegiatan seleksi calon ASN di Prov. Sulut		2 Kegiatan	76,636,000	2 Kegiatan	55,900,000				-		-		
	9	Sosialisasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi		1 Kegiatan	31,895,000	1 Kegiatan	77,700,000				-		-		
	10	Fasilitasi Penerimaan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penerimaan paraj/taruna sekolah kedinasan		4 Kegiatan	217,100,000	4 Kegiatan	256,350,000				-		-		
	11	Pengembangan Manajemen ASN berbasis Meritokrasi (Merit System)	Jumlah dokumen pengembangan ASN berbasis Meritokrasi		0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		
	12	Pelaksanaan Orientasi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K)	Jumlah pelaksanaan pembekalan: etika, etos kerja, dan profesionalisme bagi		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

			P3K, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Kontrak													
	13	Penyusunan Pola Karir Pegawai ASN dan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah kegiatan penyediaan informasi pola karir usia produktif dan Standar Kompetensi Jabatan ASN Pemprov. Sulut						2 Dokumen	120,000,000	2 Dokumen	123,000,000	2 Dokumen	126,075,000		
	14	Penerimaan Calon Pegawai ASN	Jumlah tahapan penerimaan Calon Pegawai ASN yang menjadi kewenangan daerah						4 Tahapan	120,000,000	4 Tahapan	123,000,000	4 Tahapan	126,075,000		
	15	Diseminasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan diseminasi pendidikan/sekolah kedinasan						15 Kab/Kota	80,000,000	15 Kab/Kota	82,000,000	15 Kab/Kota	84,050,000		
	16	Pelaksanaan Penerimaan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan utusan Sulawesi Utara	Jumlah tahapan penerimaan Calon Praja/Taruna Sekolah Kedinasan yang menjadi kewenangan daerah						6 Tahapan	280,000,000	6 Tahapan	287,000,000	6 Tahapan	294,175,000		
	17	Pelaksanaan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Tenaga Harian Lepas/Tenaga Kontrak	Prosentase PPPK/THL yang mengikuti orientasi dibandingkan dengan PPPK/THL yang terdaftar						40 Persen	150,000,000	40 Persen	148,750,000	40 Persen	152,468,750		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka program dan kegiatannya didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKD Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya, mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Provinsi Sulawesi Utara yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera.

Selanjutnya program disusun menurut urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 yaitu terdiri dari program PD dan urusan wajib sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Aparatur:

- a. Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara;
- b. Seleksi Peserta Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, Fungsional, dan Pendidikan Kader;
- c. Seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
- d. Monitoring terhadap PNS Tugas Belajar dan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan;
- e. Assesment Kompetensi Pegawai ASN;
- f. Penilaian Calon Pimpinan Tinggi Pratama Kabuten/Kota;
- g. Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;
- h. Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu;
- i. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu;
- j. Fasilitasi Peserta Diklat Kepemimpinan I dan II;
- k. Pemrosesan Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar;

- l. Koordinasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota;
- m. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- n. Mutasi Jabatan Administrasi;
- o. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan;
- p. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu;
- q. Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pegawai ASN;
- r. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Teknis, Fungsional, dan Manajerial Pegawai ASN;
- s. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial, Bidang, dan Sosio-Kultural setiap Jabatan.

2. Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian:

- a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat;
- b. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- c. Pemrosesan Pensiun;
- d. Pembekalan Bagi ASN memasuki Purna Tugas;
- e. Pemrosesan Status Pegawai ASN;
- f. Penilaian Kompetensi PNS Pindah-Masuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- g. Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan Pegawai ASN.

3. Program Pembinaan Aparatur:

- a. Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai ASN;
- b. Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin;
- c. Inspeksi Disiplin dan Kehadiran Pegawai ASN;
- d. Pembinaan dan Pengembangan karakter dan mental ASN.
- e. Pelaksanaan Apel Kerja

4. Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur:

- a. Kajian Kebijakan dan Hukum Bidang Kepegawaian;
- b. Penyusunan Pola Karir Pegawai ASN;
- c. Penyusunan Standar Penilaian Kinerja ASN Berbasis Jabatan dan IT;
- d. Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan;
- e. Pengembangan Materi/Soal CAT;

- f. Pemetaan Kompetensi dan Jabatan Pegawai ASN;
- g. Penyusunan Formasi Pegawai ASN;
- h. Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN;
- i. Sosialisasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan;
- j. Fasilitasi Penerimaan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan;
- k. Pengembangan Manajemen ASN berbasis Meritokrasi (Merit System);
- l. Pelaksanaan Orientasi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- m. Penyusunan Pola Karir Pegawai ASN dan Standar Kompetensi Jabatan;
- n. Penerimaan Calon Pegawai ASN;
- o. Diseminasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan;
- p. Pelaksanaan Penerimaan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan utusan Sulawesi Utara;
- q. Pelaksanaan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Tenaga Harian Lepas/Tenaga Kontrak.

5. Program Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian:

- a. Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi;
- b. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ;
- c. Pengembangan Sistem Informasi Kinerja ASN;
- d. Pengelolaan Absensi Online;
- e. Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian;
- f. Fasilitasi Penyediaan Kartu Pegawai Elektronik;
- g. Rekonsiliasi Data Kepegawaian Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

6. Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI:

- a. Fasilitasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- b. Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI;
- c. Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR di Lingkungan KORPRI;
- d. Pelaksanaan Lomba Seni dan Budaya di Lingkungan KORPRI;
- e. Fasilitasi Keikutsertaan Pegawai ASN Pada PORNAS KORPRI, Lomba Seni dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan;

- f. Musyawarah KORPRI Provinsi Sulawesi Utara;
- g. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- h. Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR serta Seni dan Budaya di Lingkungan KORPRI;
- i. Pelaksanaan PORSENI, MTQ, Lomba Kesenian dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan.

7. Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai:

- a. Seleksi pegawai ASN teladan;
- b. Pelaksanaan sumpah/janji PNS;
- c. Pemrosesan pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya;
- d. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi BPJS, Taspen dan Bapertarum.

8. Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- a. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum;
- b. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan;
- c. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa;
- d. Kebutuhan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian;
- e. Kegiatan Penataan Kearsipan;
- f. Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- b. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor.

10. Peningkatan Disiplin Aparatur:

- a. Pengadaan Mesin/kartu absensi
- b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- c. Pengadaan pakaian khusus hari tertentu.

11. Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian:

- a. Konsolidasi Manajemen Kepegawaian Se-Sulawesi Utara;
- b. Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian;
- c. Forum BKD;

- d. Survey Pelayanan Kepegawaian;
- e. Penyusunan Road Map Penerapan Sistem Merit.

**12. Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/
Kedaerahan:**

Kegiatan Pelaksanaan Lomba PBB.

13. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur:

- a. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan;
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pelatihan Kantor Sendiri;
- d. Workshop Kepegawaian;

**14. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan:**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun;
- d. Penyusunan Pelaporan Bulanan Perangkat Daerah.

15. Program Perencanaan Perangkat Daerah:

- a. Penyusunan Rencana Strategis;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

B A B VII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 merupakan komitmen seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan berpijak atas pelaksanaan reformasi birokrasi maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan menetapkan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan penataan dan pengembangan sumber daya aparatur, termasuk pencapaian dimensi pembangunan revolusi mental diakhir renstra ini. Dengan langkah ini, diharapkan pada tahun 2021, kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya di bidang kepegawaian telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas disertai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh *stakeholders* secara harmonis di semua tingkatan. Peran pemerintah Provinsi lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Manado, September 2018

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara,



DR. FEMMY J. SULUH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700426 199010 2 001